

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU DI KOPERASI NELAYAN KECAMATAN
BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi
Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



MUHAMMAD FAISAL

NPM : 167110013

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimalasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M,Si selaku Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Prodi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogiya, M,Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi ilmu kepada penulis pada saat proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.
7. Terima kasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Heri Tabrani, ibunda tercinta Fatmawati dan adik ku Muhammad Alfazillah yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungannya dalam segala hal untuk mempermudah penulis meraih gelar sarjana strata satu (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik.

8. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian Usulan Penelitian ini.

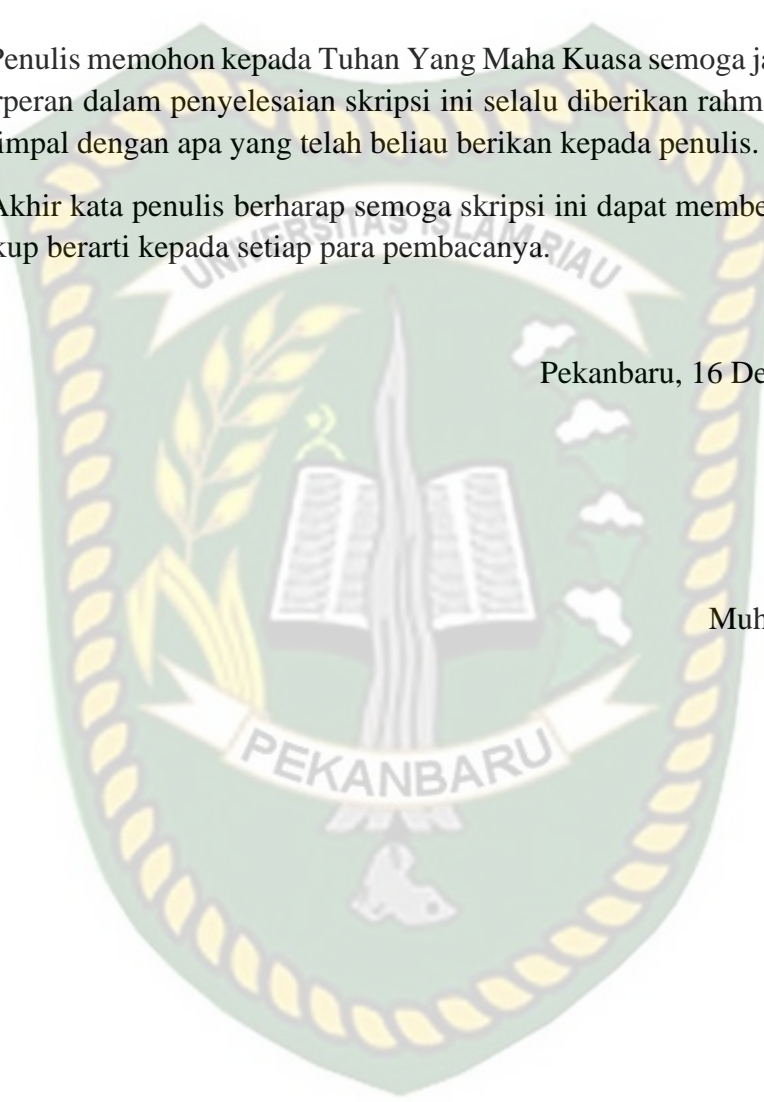
Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis. Amin...

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 16 Desember 2020

Penulis

Muhammad Faisal



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
B. Kerangka Pikir	26
C. Hipotesis	27
D. Konsep Operasional	27
E. Operasional Variabel	30
F. Teknik Pengukuran	31
BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Teknik Penarikan Sampel	37
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Jadwal Waktu Kegiatan	40

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Natuna	41
B. Profil Singkat Kecamatan Bunguran Utara	44
C. Struktur Organisasi SKPT Kabupaten Natuna	45
D. Fungsi dan Tujuan Organisasi	51
E. Sumber Daya Organisasi	52
F. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia Program SKPT	52
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 56
A. Identitas Responden	56
B. Hasil dan Pembahasan	79
C. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	82
 BAB VI : PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	 89
 LAMPIRAN	 92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Koperasi dan KUB Nelayan Kabupaten Natuna Tahun 2019.....	5
I.2 : Data Rekap Kapal Bantuan di Kabupaten Natuna Tahun 2017.....	7
II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	30
III.1 : Populasi dan Sampel	36
III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian evaluasi pelaksanaan program sentra kelautan dan perikanan terpadu di koperasi nelayan kecamatan bunguran utara kabupaten natuna.....	40
IV.1 : Jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Natuna.....	44
IV.2 : Jumlah Pengelola Berdasarkan Jabatan pada SKPT Kabupaten Natuna	52
V.1 Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin.....	56
V.2 : Responden Berdasarkan Tingkat umur.....	57
V.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Sumber Daya Aparatur.....	59

V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Sumber Daya Aparatur	61
V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Kelembagaan.....	63
V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Kelembagaan	65
V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Sarana, Prasarana dan Teknologi	67
V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Sarana, Prasarana dan Teknologi	69
V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Finansial	71
V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Finansial	73
V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Regulasi (pendukung)	75
V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Regulasi (pendukung)	77

V.14 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Terhadap Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	79
V.15 :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Terhadap Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Struktur Organisasi Koperasi Nelayan.....	6
II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	26
IV.1 : Struktur Organisasi Pelaksana SKPT	49
IV.2 : Struktur Pengelola SKPT Kabupaten Natuna	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	92
2 : Daftar Kuesioner Responden Anggota Mitra Koperasi atau Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	103
3 : Daftar Wawancara Peneliti Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna	115
4 : Daftar Telly Penelitian	119
5 : Dokumentasi Penelitian	121

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Faisal
NPM : 167110013
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negera RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Desember 2020



Muhammad Faisal

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI KOPERASI NELAYAN KECAMATAN BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK

Oleh

MUHAMMAD FAISAL (167110013)

Sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan bangsa. Potensi pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di Indonesia yang begitu besar sesungguhnya dapat didayagunakan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan SKPT Natuna akan direalisasikan dengan adanya rencana pengembangan infrastruktur serta sarana prasarana pendukung kegiatan kelautan dan perikanan. SKPT berpotensi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan dan pemrosesan perikanan di Kabupaten Natuna. Salah satu komponen pokok SKPT yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana akan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan. Salah satu jenis sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pengadaan armada kapal dan alat tangkap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran evaluasi pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna. Permasalahan dalam penelitian adalah adaya salah sasaran pada penerima kapal bantuan SKPT, kurangnya pemanfaatan kapal bantuan SKPT oleh nelayan. Dalam mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan evaluasi pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna berjalan cukup terlaksana dalam artian masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Seperti petugas Koperasi Nelayan yang harus benar-benar mendata anggota koperasi yang berhak atau tidak menerima kapal bantuan agar tidak terjadi kembali kesalahan data, dan pelaksana mengevaluasi bantuan yang akan disalurkan agar bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan.

Kata kunci : Evaluasi Pelaksanaan, Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TERPADU DI KOPERASI NELAYAN KECAMATAN
BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA**

ABSTRACT

Oleh

MUHAMMAD FAISAL (167110013)

The marine and fishery sector has an important contribution in the development of the nation. The potential of small islands and border areas in Indonesia that are so large can actually be utilized as one of the drivers of national economic growth. Natuna SKPT development will be realized with the development plan of infrastructure and infrastructure supporting marine and fishery activities. SKPT has the potential to increase fishery catching and processing activities in Natuna Regency. One of the main components of SKPT is the Construction and Development of Facilities and Infrastructure, Facilities and infrastructure will support the overall production process of marine and fishery businesses. One type of facilities and infrastructure in question is the procurement of fleets of ships and fishing gear.

This study aims to find out the evaluation picture of the implementation of Integrated Marine and Fisheries Center Program in Fishermen Cooperative of North Bunguran District, Natuna Regency. The problem in the research is the mistargeting of skpt aid ship recipients, the lack of utilization of SKPT assistance vessels by fishermen. In uncovering this problem, researchers used quantitative methods with data collection techniques in questionnaires, interviews, observations, and documentation.

The results showed that the evaluation of the implementation of Integrated Marine and Fisheries Center Program in Fishermen Cooperative of North Bunguran District, Natuna Regency is running quite well in the sense that there is still much to be considered and improved according to the established mechanism. Such as Fishermen's Cooperative officers who must actually register the cooperative members who are entitled or do not receive aid boats so that there is no data error, and the implementer evaluates the assistance that will be distributed in order to be utilized to the maximum by fishermen.

Keywords: Evaluation of Implementation, Integrated Marine and Fisheries Center Program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya laut yang besar. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membangun fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonomi kelautan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat.

Menurut pendapat Adisasmita (2013:35) yakni ada beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup : (1) pembangunan ekonomi menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas, (2) pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya,

penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, diantaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.

Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah meluncurkan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang merupakan sebuah program dari Presiden Joko Widodo yang masuk ke dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), dimana Nawa Cita ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mendukung Nawa Cita ke-3 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu hingga ke hilir yang berbasis kawasan di wilayah pulau-pulau kecil dan perbatasan. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan perbatasan merupakan program prioritas KKP tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan

sumber daya kelautan dan perikanan dan di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Susunan organisasi pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/Kepmen-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau kecil dan Kawasan Perbatasan terdiri atas Unit Administrasi dan Unit Operasional, Unit Administrasi mempunyai tugas melakukan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, dan Unit Operasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk peningkatan pengelolaan kawasan, proses produksi dan penusahaan sentra kelautan dan perikanan terpadu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi, kendala, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 42/Permen-KP/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Sesuai dengan peraturan tersebut yaitu pasal 2 ayat 3 huruf b Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mendapat tugas sebagai penanggung jawab di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan pada pasal 5 ayat 2 huruf e Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap ditugaskan sebagai pelaksana di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Sejalan dengan program SKPT pemerintah daerah Kabupaten Natuna melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 pada Pasal 7 ayat 4 huruf f dan g juga telah menyampaikan strategi untuk pengembangan sektor ekonomi yang salah satunya bertumpu pada sumberdaya bahari yang meliputi : mengembangkan fasilitas peningkatan produksi perikanan dan penyediaan ruang dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan dijelaskan secara konseptual, SKPT terdiri dari 4 (empat) komponen pokok, yaitu;

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana;
2. Pembangunan kelembagaan;
3. Pembangunan bisnis kelautan dan perikanan; dan
4. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berhubungan dengan salah satu komponen diatas yaitu komponen kelembagaan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan

pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan, dan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam Pasal 7 poin 1 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Badan yang dimaksud disini adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dari bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dari pensiunan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Pengembangan koperasi nelayan merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pembangunan dibidang perikanan dan kelautan. Peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum menjadi tujuan dibentuknya koperasi. Sulitnya akses masyarakat dalam mendistribusikan hasil perikanan menjadi momok bagi para pelaku bisnis perikanan di daerah perbatasan. Terbatasnya tempat penampungan ikan serta ketersediaan es membuat hasil tangkapan tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Koperasi nelayan menjadi solusi masyarakat sebagai pusat pelayanan berbagai perekonomian nelayan di desa-desa pesisir pantai. Tercatat pada tahun 2017 koperasi nelayan di Kabupaten Natuna telah dipercaya untuk mengelola 3 paket bantuan kapal perikanan tangkap yaitu 5 buah kapal ukuran 20 GT, 5 buah kapal ukuran 10 GT, dan 50 kapal ukuran 5 GT.

Tabel I.1 Data Koperasi dan KUB Nelayan Kabupaten Natuna Tahun 2019

No	Nama Koperasi	NIK	Jumlah Anggota KUB	Alamat
1	Koperasi Nelayan Perbatasan Lubuk Lumbang	2003020070001	30 Orang	Bunguran Timur
2	Koperasi Serba Usaha Natuna Mandiri Sejahtera	2003020030062	20 Orang	Bunguran Timur
3	Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara	2003111050002	120 Orang	Bunguran Selatan
4	Koperasi Usaha Kita Sejahtera	20030200600004	150 Orang	Bunguran Utara
5	Koperasi Nelayan Pulau Terluar Indonesia	200309004005	60 Orang	Subi
6	Koperasi Nelayan Perbatasan Kuala Pangkalan	2003070070001	50 Orang	Serasan
7	Koperasi Mutiara Kilan Cahaya	2003111050002	90 Orang	Pulau Laut
8	Koperasi Nelayan Mandiri	2003050040005	180 Orang	Midai
9	Koperasi Serba Usaha Indonesia Hijau	2003150040001	120 Orang	Bunguran Batubi
10	Koperasi Tiga Bersaudara	20030220070001	20 Orang	Pulau Tiga

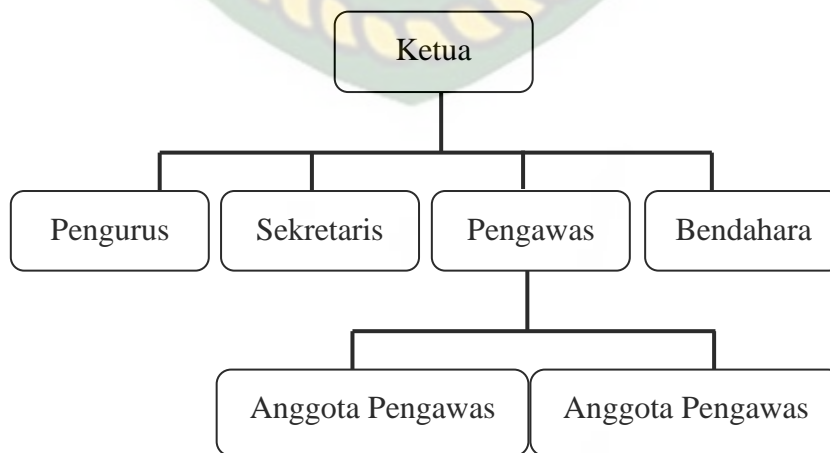
11	Koperasi Nelayan Natuna Maritim Razzaq	2003010050003	61 Orang	Bunguran Barat
12	Koperasi Serba Usaha Semarung Mekar Jaya	2003010070001	29 Orang	Bunguran Barat
13	Koperasi Nelayan Arung Ayam Jaya	-	50 Orang	Serasan Timur
14	Koperasi Nelayan Serumpun Tiga Pulau	200310003004	20 Orang	Pulau Tiga

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 2019

Dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi ialah :

1. Membayar iuran pokok sebesar 100 ribu rupiah satu kali selama menjadi anggota koperasi.
2. Membayar iuran wajib sebesar 20 ribu setiap satu bulan sekali.

Gambar I.2 Struktur Organisasi Koperasi Nelayan



Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 2019

Tabel I.2 Data Rekap Kapal Bantuan di Kabupaten Natuna Tahun 2017

No	Penerima	Sumber Dana	Ukuran Kapal	Keterangan
1	Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara	APBN 2017	10 GT	1 Kapal
2	Koperasi Usaha Kita Sejahtera	APBN 2017	10 GT	1 Kapal
3	Koperasi Perbatasan Lubuk Lumbang Sejahtera	APBN 2017	10 GT	1 Kapal
4	Koperasi Serba Usaha Indonesia Hijau (KSU-IHKN)	APBN 2017	10 GT	2 Kapal
5	Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara	APBN 2017	20 GT	3 Kapal
6	Koperasi Serba Usaha Indonesia Hijau (KSU-IHKN)	APBN 2017	20 GT	2 Kapal
7	Koperasi Usaha Kita Sejahtera	APBN 2017	5 GT	8 Kapal
8	Koperasi Nelayan Natuna Maritim Razaq	APBN 2017	5 GT	7 Kapal
9	Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara	APBN 2017	5 GT	6 Kapal
10	Koperasi Nelayan	APBN 2017	5 GT	3 Kapal

	Natuna Mandiri Sejahtera			
11	Koperasi Nelayan Pulau Terluar Indonesia	APBN 2017	5 GT	8 Kapal
12	Koperasi Nelayan Tiga Saudara	APBN 2017	5 GT	1 Kapal
13	Koperasi Nelayan Perbatasan Kuala Pangkalan	APBN 2017	5 GT	4 Kapal
14	Koperasi Perbatasan Lubuk Lumbang Sejahtera	APBN 2017	5 GT	5 Kapal
15	Koperasi Serba Usaha Indonesia Hijau (KSU-IHKN)	APBN 2017	5 GT	6 Kapal
16	Koperasi Mutiara Kilan Cahaya	APBN 2017	5 GT	2 Kapal

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 2017

Dari data diatas terlihat bahwa Koperasi Nelayan Perbatasan Mutiara Ujung Utara dan Koperasi Serba Usaha Indonesia Hijau (KSU-IHKN) merupakan koperasi yang mendapatkan bantuan kapal terbanyak yakni masing-masing mendapatkan 10 kapal bantuan. Namun yang menjadi fokus penelitian adalah Koperasi Usaha Kita Sejahtera di Kecamatan Bunguran Utara dengan jumlah bantuan sebanyak 9 kapal dan jumlah anggotanya sebanyak 150 orang. Sebelumnya diketahui bahwa Kecamatan Bunguran Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 3808 jiwa yang tersebar di 7 Desa dan 1 Kelurahan. Yang terletak cukup jauh dari pusat perkantoran Kabupaten Natuna, maka untuk kesediaan sarana dan prasarana pun masih tidak memadai di Kecamatan Bunguran Utara ini. Dengan adanya bantuan kapal ini di harapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa mensejahterakan nelayan-nelayan yang ada di pulau pulau pesisir. Dan juga bantuan tersebut di harapkan bisa dimanfaatkan oleh nelayan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dikemukakan, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan yang terjadi dilapangan yang dapat dilihat sebagai fenomena, ialah :

1. Terindikasi adanya salah sasaran pada penerima kapal bantuan SKPT, dimana ditemukan beberapa anggota koperasi yang bukan berprofesi sebagai nelayan malah tetap mendapatkan kapal bantuan tersebut.
2. Kurangnya pemanfaatan kapal bantuan SKPT oleh beberapa nelayan dikarenakan mereka tidak terbiasa untuk memakai kapal yang terbuat dari fiber, para nelayan takut akan resiko dan keselamatan mereka. Nelayan di Natuna sudah terbiasa menggunakan kapal yang terbuat dari papan atau kayu bukan berbahan fiber. Selain itu alat tangkap yang disediakan didalam kapal bantuan SKPT tersebut tidak sesuai karena alat tangkap bubu yang seharusnya terbuat dari kawat ataupun besi ini malah terbuat dari jaring sehingga tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja oleh para nelayan.

Demikian hasil fenomena yang didapat langsung oleh peneliti dari berbagai data dan sumber dengan langsung turun kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program SKPT di Koperasi Nelayan. Dan pemaparan dari latar belakang yang menjadi dasar dan ketertiban penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna”**.

A. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis ingin melakukan penelitian serta mengangkat masalah tentang :

“ Bagaimanakah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna ? “

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana Hasil Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.
- b) Untuk mrngetahui dan menganalisa hambatan – hambatan apa saja yang ditemukan dilapangan dalam Evaluasi Pelaksaaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.
- c) Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat atau nelayan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) **Kegunaan Akademis**, sebagai bahan masukan atau tolak ukur bagi pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah Kabupaten Natuna yang menangani Program SKPT serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan penulis mengenai Ilmu Administrasi Publik.
- 2) **Kegunaan Teoritis**, sebagai salah satu bahan dan penyempurnaan teori-teori dalam Ilmu Administrasi Publik.
- 3) **Kegunaan Praktis**, sebagai sumbangan pemikiran, perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya atau pembahasan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mengetahui konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa teori sesuai dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Di Kabupaten Natuna.

1. Konsep Administrasi

Administrasi disebut sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri.

1. *Pertama*, sebagai disiplin ilmu, administrasi memiliki objek materi yaitu manusia, artinya melihat daripokok masalah yang dibahas maka manusialah sosok yang dibahas. Namun demikian, yang namanya objek

materi sudah barang tentu akan bertumpag tindih (*convergency*) dengan objek materi ilmu yang lain yang sama-sama membahas manusia sebagai sosok yang dikaji, yaitu seperti ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain-lain.

2. *Kedua*, administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek forma, dalam arti sudut pandangnya adalah penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangkaian penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian berbagai kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula.
3. *Ketiga*, sebagai ilmu, administrasi diterima secara universal di seluruh dunia. Walaupun kemudian dilihat dari corak berpikir (paradigma) terdapat berbagai kutub yang saling bertolak belakang.
4. *Keempat*, sebagai ilmu, administrasi juga dapat dipelajari dan diajarkan, sehingga berbagai perguruan tinggi mendirikan jurusan dan kajian administrasi pada berbagai strata. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) sebelum menjadi universitas.
5. *Kelima*, ilmu administrasi juga mempunyai sistematika khas. Bahkan sistem administrasi suatu negara tidak sama dengan sistem administrasi negara lain. Selain itu, satu negara terkadang memiliki sistem administrasi yang berubah sesuai ruang dan waktu. (Syaffie, 2016;7)

Menurut Sondang P. Siagian (2008) administrasi itu didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama anatar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Syafri 2012;9).

Sedangkan administrasi menurut A Dunsire, dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademek dan teoritik. (dalam Keban, 2014;2)

2. Konsep Organisasi

Organisasi diartikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara terikat dalam rangka suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut pemimpin dan sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut (Siswanto, 2015;73) organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tadi jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah :

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama, serta
3. Tujuan bersama.

Sedangkan organisasi menurut Siagian (2010;9) sebagai wadah yang relative statis, antara lain mempunyai makna sebagai berikut :

- a. Organisasi dipandang merupakan pengembangan jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang.
- b. Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarkis kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab.
- c. Organisasi dipandang sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun tujuan organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumberdaya yang dimiliki.

- 3) Sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja.
- 4) Sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama.
- 5) Organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama.
- 6) Organisasi dapat membantun individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik.
- 7) Sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan.

Stephen P. Robbins (1990: 50-77) dengan meminjam pendapat dari Kim S. Cameron, mengungkapkan bahwa dalam mengukur efektivitas organisasi terdapat empat pendekatan antara lain :

1. Pendekatan *goal-attainment* mengukur sampai seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan *systems* mengukur tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan, memelihara dirinya secara internal sebagai suatu organisme, dan berinteraksi secara sukses dengan lingkungan luar.
3. Pendekatan *Strategic-constituencies* mengukur tingkat kepuasan dari para konstituen kunci.
4. Pendekatan *values* mengukur apakah kriteria keberhasilan yang dipentingkan organisasi seperti keadilan, pelayanan, *return on investment*, *market share*, *new-product innovation*, dan *job security*, telah sesuai dengan kepentingan atau kesukaan para konstituennya. (dalam Keban, 2014;228)

3. Konsep Manajemen

Menurut Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1980;3) memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. (dalam Siswanto, 2015;2)

R Terry menyatakan (dalam Zulkifli dan Yogia. 2014:18) manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang

digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaan yang telah ditetapkan semula.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu : *men, money, methode, materials, machunes, dan market.*

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*)

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya. karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

The Liang Gie memberikan pendapat bahwa manajemen administrasi adalah segenap aktivitas yang bersangkutan paut dengan masalah penggunaan tenaga kerja

manusia dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Manulang, 2006:8).

4. Konsep Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik Di Indonesia menggunakan istilah "Kebijaksanaan dan Kebijakan" dari terjemahan Policy yang dikatakan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggungjawab melayani umum. Pandangan ini dijelaskan dengan pengertian "Publik" yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum.

Perbedaan Kebijaksanaan dengan Kebijakan, yang membedakan istilah "Policy" sebagai keputusan pemerintahan yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah "Discretion" yang artinya keputusan yang bersifat kasuistis untuk satu hal.

Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. (Nugroho, 2004;50)

Suharto menyatakan (dalam Zaini Ali, 2015;4) Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005;7).

Kemudian Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (dalam Indihono, 2009;17).

Selanjutnya Mustopa (dalam Nurcholis, 2005;158) mengatakan bahwa: Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pembagian keputusan lebih lanjut, yang harus baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksanaan kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksanaan maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Kemudian Kebijakan Publik menurut James Anderson (dalam Agustino, 2017;17) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Ada beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang, dimana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata dimana kebijakan akan menimbulkan respon masalah dan kebutuhan konkret yang berkembang dalam masyarakat.
- c. Seperangkat kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan sesuatu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor kebijakan publik berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik biasa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. (Young dan quin dalam Suharto, 2005;44).

Berdasarkan pendapat diatas yang disebut kebijakan adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan bersama. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah melakukan suatu kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan pemerintah daerah sebagai dasar dan pedoman dalam segala aktifitas dan tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktifitas yang terus menerus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya dan tahap terakhir dikaitkan dengan tahap pertama atau tahap tengah, dalam lingkaran aktifitas yang tidak linier.

Adapun tahap-tahap dalam proses kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan, pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan masalah pada agenda publik.
2. Formulasi kebijakan, pada tahap ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, pada tahap ini alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan pada tahap ini kebijakan telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

5. Penilaian kebijakan, pada tahap ini unit-unit akan diperiksa oleh instansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi syarat undang-undang dalam pembuat kebijakan dan mencapai tujuan. (N. Dunn, 2013;24)

Dari penjelasan diatas, jelas dalam kebijakan telah memuat tahapan-tahapan yang sistematis dan saling berhubungan untuk dapat diimplementasikan nantinya itu perlu adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Konsep Evaluasi

Ndara (2003;201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukur adalah before.
2. Model dan solen-dassein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur adalah das sollen.
3. Model kelompok control-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok control.

Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementas kebijakan saja (lihat pada Wiarno, 2002). Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan (dalam Nugroho, 2004;184)

Kemudian Wibawa menyatakan (dalam Nugroho, 2004;186) evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selanjutnya Anderson (dalam Ali, 2015:86) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Menurut Jones (dalam Agustino, 2017:165-166) evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menguji kualitas beberapa jenis program pemerintah yang penting, yang mana kegiatan tersebut diantaranya adalah melihat kondisi objek program, perencanaan teknik pengukuran dan metode analisis yang digunakan serta format usulan setelah evaluasi dilaksanakan. Dan juga menurut Jones (1996:203) evaluasi dapat digunakan untuk dua tujuan: (i) untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan proses kebijakan, dan (ii) sebagai usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah tertentu.

Kemudian (Agustino, 2018:180) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik antara lain sebagai berikut :

1. Sumber daya aparatur (SDA)
 2. Kelembagaan
 3. Sarana, prasarana, dan teknologi
 4. Finansial
 5. Regulasi (pendukung)
- 6. Konsep Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam sebuah kebijakan atau program yang telah dibuat sangatlah penting, karena pecuma adanya sebuah kebijakan atau program tanpa adanya pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri, proses implementasi kebijakan atau program ini dapat dikatakan paling penting dalam proses perumusan tujuan sebuah organisasi. Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi.

Jika dikaitkan dengan penjelasan Administrasi dan Manajemen, ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu Sedangkan manajemen sendiri memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. dengan demikian dapat diterjemahan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari penerapan proses administrasi dan manajemen.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Van Matter dan Van Horn (dalam Agustino. 2017:139) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu

atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya Terry (1986) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2006,126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Lalu Terry (dalam Syafiie,2006;81) berpendapat bahwa pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok sasaran agar sesuai dengan perencanaan berkenan berusaha untuk mencapai manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan

dengan hal tersebut maka upaya mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas disuatu organisasi merupakan hal penting yang harus dilaksanakan.

Standar pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa actualing (pelaksanaan) ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tersebut.

7. Konsep Program

Solihin (2009;71) mengatakan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki durasi waktu tertentu serta dibuat untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Selanjutnya Umar (2005,15) program atau program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disamakan dengan program.

Untuk mengukur kinerja program telah dikembangkan 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan yang menilai perilaku atau yang dikenal dengan pendekatan

perilaku, dan pendekatan yang menilai hasil dan manfaat yang diberikan atau disebut pendekatan hasil.

1. Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pekerjaan. Pendekatan ini menekankan *quality of task-oriented behavior*. Yang diamati dalam pendekatan ini adalah apakah perilaku atau cara tertentu mampu memberikan hasil tertentu, yang kemudian dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pengembangan metode kerja selanjutnya. Perubahan perilaku, pengembangan metode dan teknik yang digunakan, menjadi pusat perhatian utama dalam rangka perbaikan kinerja. Hasil aplikasi pendekatan ini adalah perubahan atau perbaikan metode dan teknik kerja.
2. Pendekatan hasil atau yang lebih dikenal dengan *result-oriented criteria* mempelajari apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tuntutan dari pihak yang membutuhkan dan telah diberikan dengan kualitas terbaik atau distribusikan secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Dalam pendekatan ini, kesesuaian antara nilai yang hendak dihasilkan dan didistribusikan, dengan nilai dari pihak yang membutuhkan, serta kualitas dari cara memberi atau mendistribusikan nilai tersebut, merupakan pusat perhatian. Bahkan pada masa sekarang, orientasi kepada kualitas benar-benar ditekankan karena adanya tuntutan publik akan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah di sektor publik secara prima (Martin & Kettner, 1996 dalam Keban, 2014:221).

8. Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen dan akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang keliatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan

hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. (Siagian, 2017;4)

Selanjutnya Galtung (dalam Trijono, 2007;3) pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

9. Konsep Pemberdayaan

Berdasarkan pendapat Adisasmita (2006:35) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan yang lebih efektif dan efisien, seperti:

1. Aspek masukan atau input seperti Sumber Daya Manusia (SDM), dana peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi
2. Aspek proses seperti pelaksanaan, monitoring dan pengawasan.
3. Aspek keluaran dan output seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.

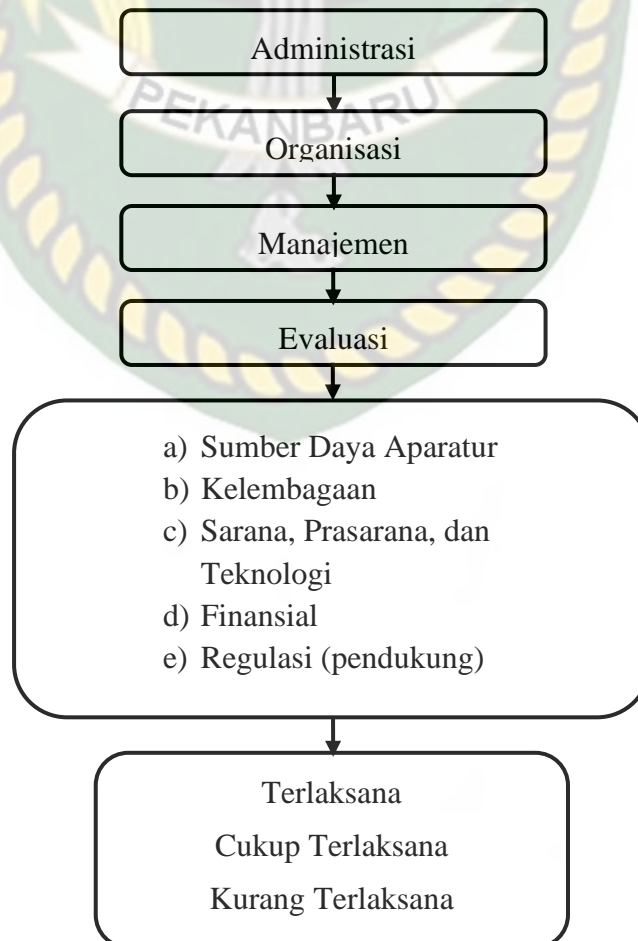
Selanjutnya Sumaryadi (2005;11) pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut sumaryadi juga pada dasarnya sebagai berikut:

1. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dan masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

A. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada teor-iteori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini yaitu :

GAMBAR II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program SKPT di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna



Sumber : Modifikasi Peneliti,2020

B. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas dilakukan penelitian terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yaitu terdapat beberapa kendala yang membuat program tersebut belum berjalan dengan baik.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari kesalahan pemahaman penelitian terhadap maka penulis perlu mengoperasionalkan variable-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Adapun konsep itu adalah :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan anantara dua orang atau lebih yang berkerja bersama secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tentukan dalam ikatan dimana tujuan yang telah di

terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan
4. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses, cara pembuatan, melaksanakan atas keputusan yang telah diberikan dan ditetapkan sebelumnya.
5. Program adalah serangkaian kegiatan yang mendukung tujuan perusahaan.
6. Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.
7. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

8. Sumber daya aparatur merupakan sesuatu yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya.
9. Kelembagaan adalah suatu bentuk kesatuan unsur formal (kesepakatan) beserta jaringan dukungan yang dikembangkan di dalamnya secara terorganisasi, yang secara berkesinambungan mempengaruhi sistem pengelolaan sumber daya suatu entitas tertentu, untuk menghasilkan dan atau melindungi perubahan ke arah pencapaian tujuan pembangunan tertentu.
10. Sarana, prasarana, dan teknologi. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Dan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indra dan otak manusia.
11. Finansial berasal dari bahasa Inggris yaitu finance yang berarti keuangan dan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), finansial mempunyai arti mengenai urusan keuangan.
12. Regulasi (pendukung) diperlukan oleh suatu kebijakan agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Tujuan dari regulasi (pendukung)

adalah untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi sibek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengatur variabel tersebut. Sedangkan variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program SKPT di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Konsep	Variabel	Indikator	Item Pinilaian Program	Ukuran
1	2	3	4	5
Pada umumnya evaluasi kebijkan adalah penilaian atas kebijakan yang tengah atau sudah diimplemen tasikan. Evaluasi juga	Evaluasi Pelaksana an Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	1. Sumber daya aparatur (SDA) 2. Kelembagaan	1. Kualitas SDA sebagai pelaksana kebijakan 2. Kemampuan SDA dalam pelaksanaan kebijakan 3. Memahami tugas dan fungsinya 1. Kelancaran koordinasi 2. Pola kepemimpinan 3. Sinergitas antar	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang

1	2	3	4	5
program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan. (Agustino, 2017;163)		4. Finansial 5. Regulasi (pendukung)	1. Daya dukung keuangan 2. Biaya operasional 3. Biaya Administrasi 1. Adanya petunjuk pelaksana 2. Adanya petunjuk teknis 3. Adanya monitoring pendamping	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau		3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi	lembaga 1. Pengawasan sarana prasarana 2. Ketersediaan sarana prasarana 3. Pemanfaatan sarana prasarana	Terlaksana Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penelitian,2020

E. Teknik Pengukuran

Penelitian setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018;93). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini menggunakan 3 kategori penilaian, yakni: Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Setiap jawaban diberi penilaian secara persentase sebagai berikut:

- a. Terlaksana dengan persentase 67%-100%
- b. Cukup Terlaksana dengan persentase 34%-66%
- c. Kurang Terlaksana dengan persentase 1%-33%

Untuk mengukur penilaian variabel penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna berada pada kategori 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh indikator Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna berada pada kategori 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila seluruh indikator Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan

Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna berada pada persentase 1%-33%.

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator ialah:

1. Sumber daya aparatur (SDA)

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada persentase 1%-33%.

2. Kelembagaan

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sumber daya berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator sumber daya berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian

pada indikator sumber daya berada pada persentase 1%- 33%.

3. Sarana, prasarana, dan teknologi

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator komunikasi berada pada persentase 1%- 33%.

4. Finansial

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 34%-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator agen pelaksana berada pada persentase 1%-33%.

5. Regulasi (pendukung)

Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 34%- 66%.

Kurang Terlaksana : Apabila jumlah penilaian terhadap setiap item penilaian pada indikator lingkungan berada pada persentase 1%-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kuantitatif, metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (dalam Sugiyono, 2018;8).

Sifat penelitiannya adalah survey deskriptif yaitu penelitian menggunakan sejumlah sampel (responden) sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari

sampel dijadikan sebagai bahan utama untuk menganalisis keberadaan objektif dari variabel yang diteliti, artinya pada penelitian ini peneliti langsung melakukan survey lapangan untuk proses pengamatan langsung yang terjadi pada proses pelaksanaan.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2011;35)

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kelarik Utara Tanjung Dedap, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian Khasan Effendy (2014;101)

Secara etimologi sampel yaitu sesuatu yang di gunakan untuk menunjukkan sifat sesuatu kelompok yang lebih besar, bagian dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan Khasan Effendy (2014;101).

Tabel III.1 Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera	1	1
2	Unit Administrasi SKPT	3	3
3	Pengawas dan Pengurus Koperasi KUKS	6	6
4	Anggota Mitra Koperasi atau Nelayan	150	14
	Jumlah	156	24

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan modifikasi penulis 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam setiap penelitian teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya. Berdasarkan pertimbangan untuk menentukan sampel responden anggota pengurus Koperasi Usaha Kita Sejahtera menggunakan teknik sensus, penggunaan teknik ini berlaku jika populasi relative kecil dan dapat dijangkau. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka peneliti mengambil seluruh jumlah populasi pengurus Koperasi Usaha Kita Sejahtera dijadikan sampel dengan jumlah 5 orang.

Kemudian untuk menentukan sampel anggota mitra koperasi atau nelayan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan atas penilaian atau tujuan tertentu saja dan dianggap sudah mewakili dari keseluruhan jumlah populasi. Diketahui jumlah populasi anggota mitra koperasi atau nelayan sebanyak 150 orang, peneliti membatasi sampel menjadi 14

orang. Hasil ini didapatkan dari pencarian menggunakan rumus $n = \frac{N}{1+N.e}$. Maka jumlah keseluruhan sampel penelitian menjadi 24 orang. Dengan jumlah sampel ini peneliti tidak memakan waktu yang lama untuk melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang peneliti peroleh dari sumber-sumber buku, dokumen, jurnal yang dapat dijadikan data pendukung dalam melakukan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab langsung terhadap responden dan dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data dari informan.

- c. Kuisioner, yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variabel penelitian dan kemudian disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Bogdan (dalam Sugiyono 2018:244).

Semua data yang diperoleh dalam penelitian melalui instrument atau alat penelitian berupa daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan di olah untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian secara kuantitatif atau pengelompokkan dan penyajian data melalui angka-angka yang berbentuk tabel atau tunggal. Kemudian data tersebut di presentasikan, dijelaskan dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian guna mendapatkan hasil penelitian tersebut kemudian di ambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Table III.2 : Jadwal waktu kegiatan penelitian evaluasi pelaksanaan program sentra kelautan dan perikanan terpadu di koperasi nelayan kecamatan bunguran utara kabupaten natuna

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Mei				Jun				Jul				Agus				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■	■	■																
2	Seminar UP								■																
3	Revisi UP									■	■														
4	Daftar wawancara										■														
5	Rekomendasi Survey											■													
6	Survey Lapangan											■													
7	Analisis data												■	■											
8	Penyusunan Skripsi														■	■	■	■							
9	Konsultasi																	■	■	■	■				

Kabupaten Natuna memiliki luas 264.198,37 Km² dengan luas daratan 2.001,30 Km² dan lautan 262.197,07 Km² dimana Ranai sebagai Ibukota Kabupaten Natuna. Di kabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan. Kabupaten ini terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000. barel.

Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Natuna merupakan tanah berbukit dan bergunung batu. Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara kecamatan cukup beragam, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 959 meter dari permukaan laut dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan yang tanah dasarnya mempunyai bahan granit, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus.

Iklim di Kabupaten Natuna adalah tropis basah dengan suhu rata-rata 26 °C dan sangat dipengaruhi oleh perubahan arah angin. Kelembaban udaranya berkisar antara 60% dan 85%. Sedangkan, curah hujannya rata-rata 2.530 mm dengan jumlah hari hujan 110 pertahun. Bulan-bulan yang basah terjadi pada bulan Oktober-Desember dengan kecepatan angin rata-rata 276 km perhari [sic]. Sedangkan, penyinaran matahari rata-rata 53%. Cuacanya sering tidak menentu. Hujan disertai angin kencang, badai yang bergemuruh, dan gelombang yang mencapai ketinggian lebih dari tiga meter acapkali terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan arah angin, masyarakat setempat mengenal adanya 4 musim, yakni: Utara, Timur, Selatan, dan Barat.

Selain letaknya yang strategis kawasan Pulau Natuna dan sekitarnya pada hakikatnya dikaruniai serangkaian potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara memadai atau ada yang belum sama sekali, yaitu:

- Sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna.
- Pertanian & perkebunan seperti ubi-ubian, kelapa, karet, sawit dan cengkih.
- Objek wisata: bahari (pantai, pulau selam), gunung, air terjun, gua dan budidaya.
- Ladang gas D-Alpha yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEEI) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT merupakan salah satu sumber terbesar di Asia.

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 oktober 1999, dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan. Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan

Pal Matak, Subi, Bunguran Utara dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.

Hingga tahun 2007 Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75. Pada Tahun 2008 kabupaten Natuna melakukan pemekaran dengan dibentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga kecamatan menjadi 12 Kecamatan. Lalu hingga tahun 2017 Kabupaten Natuna memiliki 15 kecamatan, 6 kelurahan dan 70 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2018, jumlah penduduknya sebesar 76.968 jiwa dengan luas wilayahnya 2.009,85 km² dan sebaran penduduk 37 jiwa/km².

Tabel IV.1 : Jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Midai	3.504
2	Suak Midai	1.590
3	Bunguran Barat	7.694
4	Bunguran Batubi	3.485
5	Bunguran Utara	4.017
6	Pulau Laut	2.584
7	Pulau Tiga	3.276
8	Pulau Tiga Barat	1.649
9	Bunguran Timur	28.200
10	Bunguran Timur Laut	4.450
11	Bunguran Tengah	3.039
12	Bunguran Selatan	2.588
13	Serasan	5.182
14	Subi	2.917
15	Serasan Timur	2.793

Jumlah	76.968
--------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna, 2018

Penduduk Kabupaten Natuna sangat Heterogen dengan mayoritas beragama islam. Selain suku melayu yang merupakan suku khas, penduduk kabupaten Natuna berasal dari berbagai suku bangsa seperti Banjar, Batak, Bugis, Jawa, Minang, Tiong Hoa, dan lain-lain.

B. Profil Singkat Kecamatan Bunguran Utara

Kecamatan Bunguran Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Natuna. Kecamatan Bunguran Utara sendiri memiliki luas wilayah 19.493,11km² dengan jumlah penduduk 3.808 jiwa. Ibu Kota Kecamatan Bunguran Utara terletak di desa Kelarik yang nama asalnya Kelarik selahang. Wilayah ini terdiri dari 8 desa, yaitu:

1. Desa Kelarik
2. Desa Kelarik Utara
3. Desa Kelarik Barat
4. Desa Kelarik Air Mali
5. Desa Seluan Barat
6. Desa Belakang Gunung
7. Desa Gunung Durian
8. Desa Teluk Butun

C. Struktur Organisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Natuna

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Natuna memiliki visi dan misi yakni :

Visi :

- Mewujudkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan serta sumber daya manusia sebagai basis pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Misi :

- Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Mengembangkan sistem pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan.
- Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi, dan keanekaragaman hayati laut.

- Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
- Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui pengembangan kapasitas SDM dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.
- Memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat lokal

Untuk mewujudkan visi dan misi SKPT Kabupaten Natuna ditetapkan beberapa strategi dan tujuan, yakni:

- Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan secara terintegrasi untuk menopang usaha ekonomi nelayan dan pembudidaya yang bersifat tradisional dan konvensional dapat berkembang menjadi bisnis kelautan dan perikanan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar
- Penguatan SDM dan kelembagaan agar kapasitas dan kompetensi nelayan lebih baik, sehingga produktivitas produk dan hasil pengolahan perikanan meningkat. Selain itu, mendorong bisnis perikanan menggunakan sistem dan model bisnis yang lebih modern melalui korporatisasi, sehingga manfaat diperoleh dalam jumlah yang lebih besar

- Pengembangan kemitraan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi dari bisnis kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya, mulai hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait
- Pendampingan untuk memberikan pembinaan, asistensi dan supervisi pelaksanaan bisnis kelautan dan perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. Pendampingan dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping/fasilitator yang bertugas memberikan pembinaan bagi nelayan dan pembudidaya serta kelembagaannya, sehingga nelayan dan pembudidaya memiliki kapasitas yang baik dalam hal manajemen dan teknis terkait bisnis kelautan dan perikanan yang dikembangkan, serta kelembagaan usaha menjadi efektif.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan juga dijelaskan mengenai organisasi pelaksana SKPT. Organisasi pelaksana SKPT bersifat adhoc yang dibentuk mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Adapun struktur organisasi pelaksana SKPT sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

- a) Dibentuk Sekretariat Pusat yang beranggotakan unsur dari KKP, terdiri dari Pembina, Pengarah/Penanggunjawab, dan Pelaksana

- b) Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing lokasi SKPT, terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota
- c) Dibentuk Pengelola SKPT dilokasi SKPT, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Tenaga Pendukung.

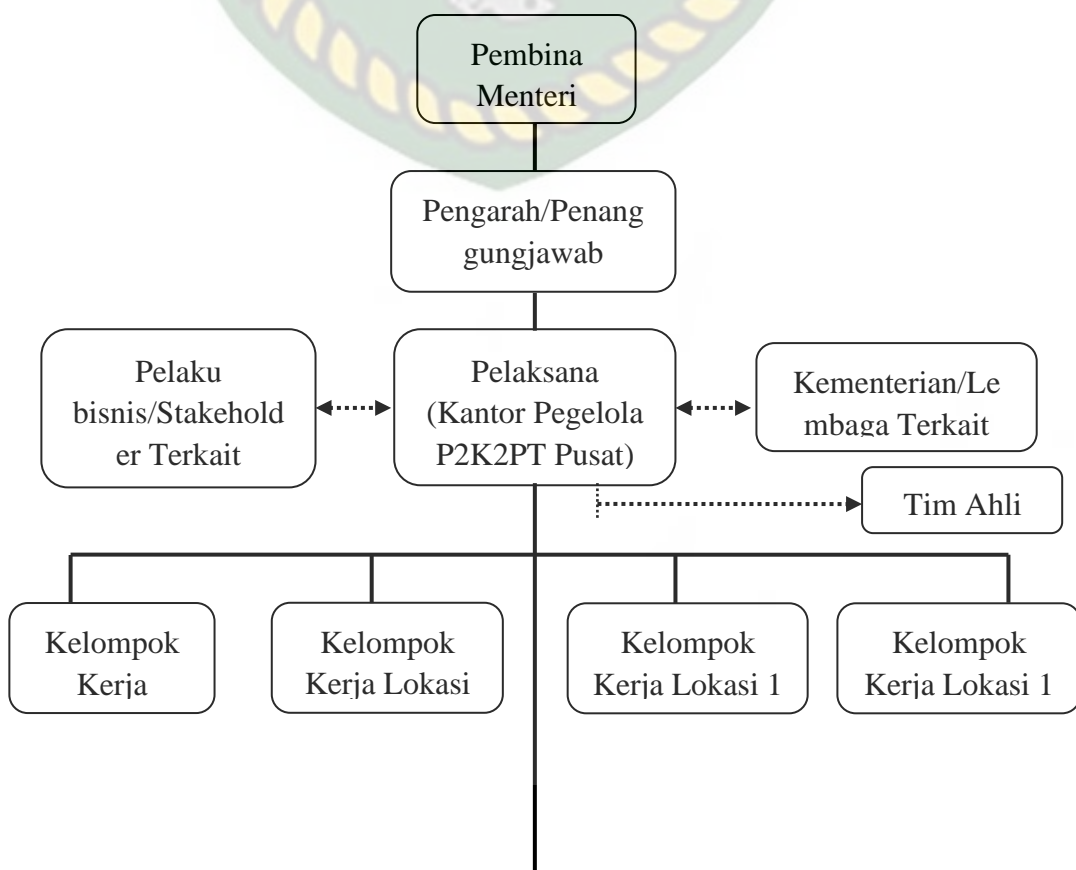
2. Tingkat Provinsi

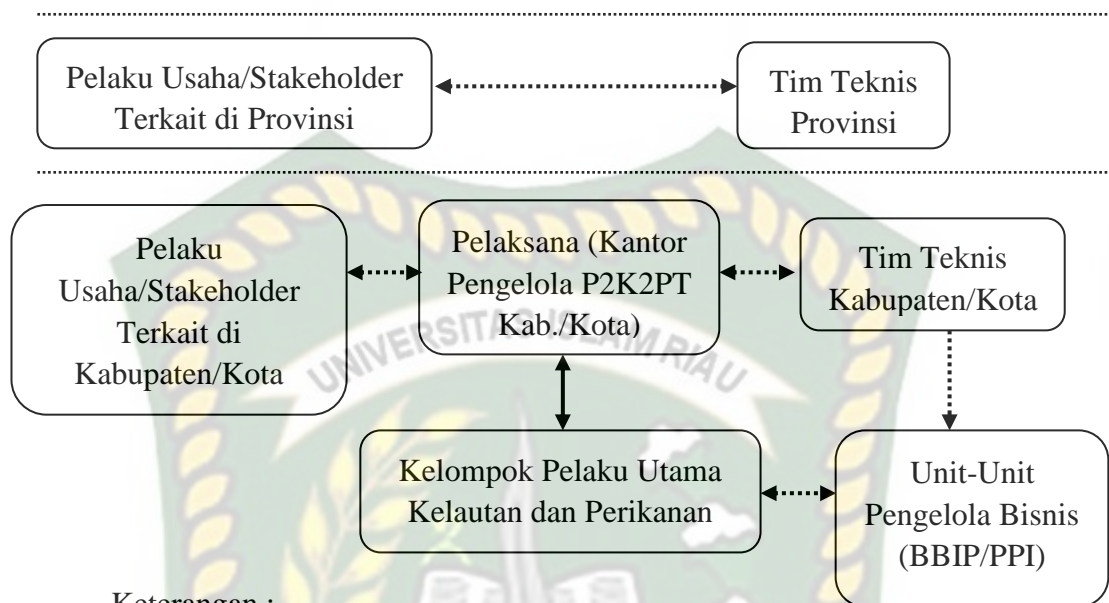
Gubernur membentuk Tim Kerja SKPT tingkat provinsi yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait lainnya.

3. Tingkat Kabupaten

Bupati/Walikota membentuk Tim Kerja SKPT tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, SKPD terkait, dan stakeholder terkait lainnya.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pelaksana SKPT





Keterangan :

- a) Lokasi adalah Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi lokasi SKPT
- b) Garis koordinatif
- c) ——— Garis Intruksi

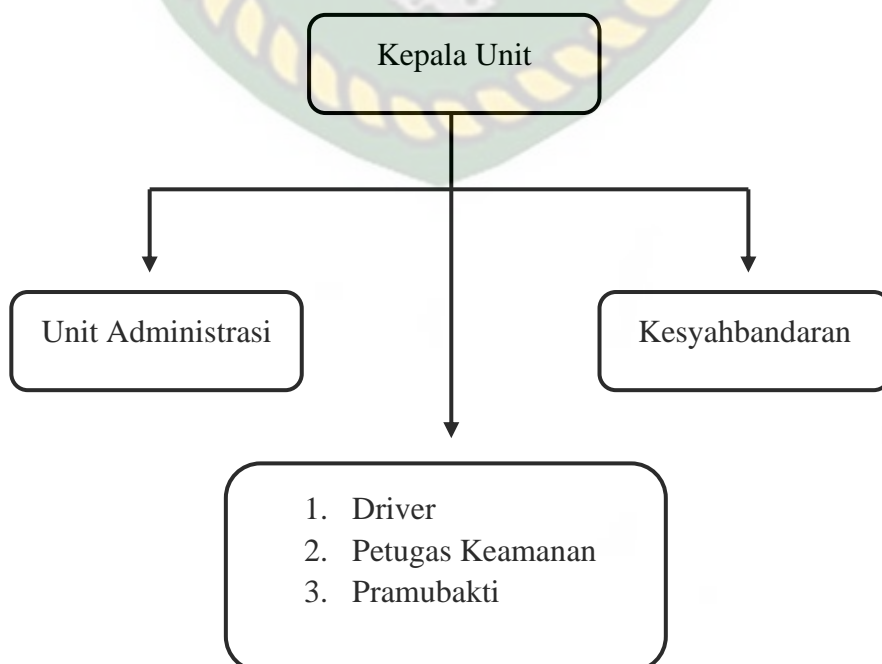
Sumber : Pedoman umum Pembangunan SKPT

Sedangkan susunan organisasi pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/Kepmen-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau kecil dan Kawasan Perbatasan terdiri atas Unit Administrasi dan Unit Operasional, Unit Administrasi mempunyai tugas melakukan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, dan Unit Operasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga terkait untuk peningkatan pengelolaan kawasan, proses produksi dan penusahaan sentra kelautan dan perikanan terpadu,

monitoring, evaluasi, dan pelaporan realisasi, kendala, dan permasalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu dipulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 42/Permen-KP/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Sesuai dengan peraturan tersebut yaitu pasal 2 ayat 3 huruf b Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mendapat tugas sebagai penanggung jawab di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan pada pasal 5 ayat 2 huruf e Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditugaskan sebagai pelaksana di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar IV.2 : Struktur Pengelola SKPT Kabupaten Natuna



Sumber: SKPT Kabupaten Natuna

D. Fungsi dan Tujuan Organisasi

Dalam rangka fokus pembangunan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan diarahkan pada empat aspek yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah
2. Peningkatan daya saing
3. Modernisasi dan korporatisasi usaha
4. Penguatan produksi dan produktivitas

E. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya di dalam organisasi adalah sumber daya manusia dan sarana prasana yang menunjang segala proses menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia sendiri yakni orang-orang yang menjabat melaksanakan tugas dan fungsinya yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan SKPT Kabupaten Natuna. Adapun jumlah pegawai atau aparatur berdasarkan jabatan pada SKPT Kabupaten Natuna terdiri dari:

Tabel IV. 2 Jumlah Pengelola Berdasarkan Jabatan pada SKPT Kabupaten Natuna Tahun 2017

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Unit	1
2	Unit Administrasi	3
3	Syahbandar	1

4	Driver	1
5	Petugas Keamanan	3
6	Pramubakti	5
7	Jumlah	14

Sumber : SKPT Kabupaten Natuna

F. Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kabupaten Natuna

Tugas organisasi pelaksana Program SKPT adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat

a) Pembina :

Membina pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan.

b) Pengarah/penanggung jawab mempunyai tugas :

1) Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan.

2) Mengarahkan pelaksanaan koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan perbatasan, lintas eselon I dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas KL terkait.

3) Memantau pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dan/atau kawasan

perbatasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

c) Pelaksana Pusat mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil dengan pihak terkait.
- 3) Melaksanakan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil sesuai perencanaan.
- 4) Memantau progres pekerjaan dan hasil pekerjaan Pokja masing-masing lokasi SKPT.
- 5) Melakukan evaluasi kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim kerja provinsi dan tim kerja kabupaten/kota dalam rangka sinergitas pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.

d) Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing mempunyai tugas :

- 1) Melakukan survey identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan guna pelaksanaan

Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.

- 2) Melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dengan daerah/kabupaten dan kota lokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana.
- e) Pelaksana Kabupaten/Kota SKPT mempunyai tugas :
- 1) Membantu Pokja dalam melakukan survey identifikasi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan di lokasi masing-masing, guna pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 2) Membantu Pokja melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kabupaten/kota lokasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kelautan dan Perikanan terintegrasi di Pulau-Pulau Kecil.
 - 3) Melaporkan realisasi hasil pekerjaan kepada Pelaksana Pusat.
 - 4) Melaporkan kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan SKPT pada masing-masing lokasi SKPT kepada Pelaksana Pusat.
- f) Kantor Pengelola Pusat dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan SKPT.

2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi membentuk Tim Kerja SKPT provinsi, dengan tugas:

- a) Mengkoordinasikan dukungan kegiatan SKPT di tingkat provinsi yang memperoleh kegiatan SKPT.

- b) Merumuskan sinergitas kegiatan SKPT dengan SKPD terkait ditingkat provinsi.

3. Tingkat Kabupaten

Ditingkat Kabupaten/Kota membentuk Tim Kerja SKPT Kabupaten/Kota, dengan tugas :

- a) Mengoordinasikan dukungan kegiatan SKPT ditingkat Kabupaten/Kota yang memperoleh kegiatan SKPT
- b) Merumuskan sinergitas kegiatan SKPT dengan SKPD terkait ditingkat Kabupaten/Kota.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif tipe deskriptif dengan cara pencarian informasinya melalui survey turun lapangan menyebarkan kuesioner yang telah dirancang oleh peneliti yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas agar kuesioner yang didistribusikan dapat memberikan gambaran, agar data tidak memiliki kendala normalitas dan syarat-syarat untuk melakukan pengujian hipotesis lainnya.

Identitas responden berguna untuk mengetahui seberapa banyak responden yang berdasarkan tingkat jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam

penelitian ini sehingga lebih memperjelas hasil penelitiannya. Secara rincinya identitas responden penelitian akan disajikan pada tabel dibawah ini:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Tabel V.1 Responden Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	21	87%
2	Perempuan	3	13%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.1, terlihat bahwa responden yang terdiri dari pengurus dan pengawas koperasi nelayan KUKS, petugas SKPT, dan anggota mitra koperasi atau nelayan . Dari 24 responden, yang menjadi responden laki-laki sebanyak 21 dengan jumlah persentasenya (87%) ,sedangkan responden Perempuan sebanyak 3 atau dengan jumlah persentase (13%) . Jadi yang paling dominan menjadi responden pada penelitian ini ialah laki-laki, hal ini karena responden anggota mitra koperasi atau nelayan yang menerima bantuan dari SKPT merupakan para suami atau yang mencari nafkah bagi keluarganya.

2. Identitas Berdasarkan Usia

Umur merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Berikut tingkat umur yang peneliti jadikan responden :

Tabel V.2 Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	17 - 26 tahun	2	8%
2	27 – 36 tahun	7	29%
3	37 – 46 tahun	10	42%
4	47– 56 tahun	5	21%

Jumlah	24	100%
--------	----	------

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.2, dalam hal ini peneliti mendapatkan data mengenai umur keseluruhan responden yang dibagi 4 kelompok. Diantaranya rentang umur 17-26 tahun terdapat 2 orang (8%), rentang umur 27-36 tahun terdapat 7 orang (29%), selanjutnya rentang umur 37- 46 tahun terdapat 10 orang (42%), rentang umur 47-56 tahun terdapat 5 orang (21%), Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling dominan menjadi responden peneliti berada pada rentang umur 37-46 tahun. Ini menjadi tolak ukur bagi responden dalam merekap hasil jawaban kuesioner. Dengan rentang umur seperti ini, yang sudah matang dan dewasa peneliti harapkan responden bisa mengerti atas pertanyaan yang diberikan dan menjawab dengan baik.

3. Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan didunia ini. Seseorang yang pendidikan akan berfikir secara luas dan rasional , dapat membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

Untuk mengetahui, berikut jumlah responden dengan tingkat pendidikannya:

Tabel V.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	3	13%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	8%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	13	54%
4	Diploma (D1, D2, D3, D4)	1	4%
5	Sarjana (S1)	5	21%
	Jumlah	24	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.3, diketahui bahwa responden berdasarkan tingkat

pendidikan didominasi dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni berjumlah 13 orang dengan persentase 54%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang terdiri dari pengurus koperasi nelayan KUKS, petugas SKPT, dan anggota mitra koperasi atau nelayan memiliki pendidikan yang cukup baik, dan semua respondennya dilatar belakangi dengan pendidikan setidaknya mereka bisa membaca terutama bagi pasien.

B. Hasil dan Pembahasan

Selanjutnya pada sub bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan sekaligus membahas dari tanggapan-tanggapan responden yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara oleh pengurus koperasi nelayan KUKS dan anggota mitra koperasi atau nelayan.

1. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh SDA. Dalam artian, ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejauhmana mereka mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka buat, dan lain sebagainya. Jika aparaturnya tidak mengerti dan memahami atas tugas dan fungsinya dalam melakukan suatu tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berbuah positif (dalam buku Leo Agustino, 2017;181).

Tabel V.4 Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasai Usaha Kita Sejahtera Indikator Sumber Daya Aparatur

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	

1.	Kualiatas SDA sebagai pelaksana kebijakan	5 (50%)	5 (50%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Kemampuan SDA dalam pelaksanaan kebijakan	3 (30%)	7 (70%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Memahami tugas dan fungsinya	6 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		14	16	0	30
Rata-rata		4	6	0	10
Persentase		40%	60%	0	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.4 dijelaskan hasil penilaian indikator Sumber Daya Aparatur dari jawaban 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 5 orang (50%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (50%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang (70%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 10 responden peserta petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sumber Daya Aparatur yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (47%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (53%), dan

yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain dari hasil jawaban kuisioner 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera, beliau menyatakan:

”Untuk pengurus koperasi sendiri kita terbagi menjadi beberapa bidang atau jabatan, tiap jabatan ini sesuai dengan tugasnya masing-masing. saya sendiri sebagai kepala koperasi, selain itu kita juga punya kepala pengawas, anggota pengawas, sekretaris dan juga bendahara nah semua pengurus ini kita sebut anggota koperasi dan para nelayan yang tergabung di dalam koperasi kita sebut anggota mitra koperasi (Wawancara, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.12 WIB).

Selanjutnya tanggapan dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.5 Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Sumber Daya Aparatur

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kualiatas SDA sebagai pelaksana kebijakan	4 (29%)	9 (64%)	1 (7%)	14 (100%)
2.	Kemampuan SDA dalam pelaksanaan kebijakan	4 (29%)	6 (42%)	4 (29%)	14 (100%)
3.	Memahami tugas dan fungsinya	4 (29%)	10 (71%)	0 (0%)	14 (100%)
Jumlah		12	25	5	42
Rata-rata		4	8	2	14

Persentase	29%	57%	14%	100%
------------	-----	-----	-----	------

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.5 dijelaskan hasil penilaian indikator Sumber Daya Aparatur dari jawaban 14 responden nelayan. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 9 orang (64%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 1 orang (7%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (42%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 4 orang (29%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), Cukup Terlaksana sebanyak 10 orang (71%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sumber Daya Aparatur yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 orang (14%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Berdasarkan penelitian dilapangan, untuk indikator sumber daya aparatur peneliti merangkumkan dengan seluruh hasil jawaban kuesioner dari petugas SKPT dan pengurus koperasi nelayan KUKS. Dalam hal ini peneliti cukup terlaksana. Meskipun ada sebagian jawaban responden nelayan, mereka merasa para pengurus koperasi tidak melakukan tugasnya dengan maksimal contoh saja yang menjadi anggota koperasi bukan hanya mereka yang menjadi nelayan tetap

melainkan mereka yang bekerja sebagai petani atau tukang bangunan misalnya dan hanya sesekali saja melaut malah boleh menjadi anggota dan juga mendapatkan bantuan kapal tersebut, padahal bantuan tersebut semestinya dapat diberikan kepada nelayan yang lebih membutuhkan dari pada diberikan kepada mereka yang bukan berprofesi sebagai nelayan.

2. Kelembagaan

Dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Menurut Acemoglu & Robinson (2012), keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik (atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan). Argumen mereka menunjukkan bahwa sinergitas kelembagaan dalam menyukseskan suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Demikian pula halnya dengan evaluasi kebijakan, semakin koordinasi tidak lancar, diskresi yang fleksibel, sistem organisasi yang terlalu kaku dan komando, pola kepemimpinan yang otokratik, misalnya harga suatu sinergitas antar lembaga dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil (dalam buku Leo Agustino, 2017;181).

Tabel V.6 Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Kelembagaan

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	

1.	Kelancaraan Koordinasi	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Pola Kepimpinan	6 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Sinergitas Antar Lembaga	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		20	10	0	30
Rata-rata		7	3	0	10
Persentase		70%	30%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.6 dijelaskan hasil penilaian indikator Kelembagaan dari jawaban 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 7 orang (70%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 3 orang (70%), Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 10 responden peserta petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Kelembagaan yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang (70%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Terlaksana”.

Selain hasil dari jawaban kuisisioner 10 responden petugas SKPT dan pengurus Koperasi Usaha Kita Sejahtera peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera, beliau menyatakan:

”Sejauh ini program bantuan kapal dari SKPT berjalan dengan baik, dan juga kami para pengurus koperasi ini selalu berkoordinasi dengan pihak dari KKP atau SKPT dan pihak Dinas Kelautan Perikanan contohnya yaitu pengaduan-pengaduan dari nelayan kita sampaikan ke pihak pihak tersebut, hal ini kita lakukan agar apa yang jadi keluhan nelayan dilapangan dapat didengar oleh pihak pihak tersebut sehingga kedepannya jika ada bantuan lagi maka akan sesuai dengan keinginan dari para nelayan itu sendiri” (Wawancara, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.12 WIB).

Selanjutnya tanggapan dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.7 Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Kelembagaan :

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kelancaraan Koordinasi	5 (36%)	9 (64%)	0 (0%)	14 (100%)
2.	Pola Kepimpinan	6 (43%)	8 (57%)	0 (0%)	14 (100%)
3.	Sinergitas Antar Lembaga	6 (43%)	8 (57%)	0 (0%)	14 (100%)
Jumlah		17	25	0	42

Rata-rata	6	8	0	14
Persentase	43%	57%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.7 dijelaskan hasil penilaian indikator Kelembagaan dari jawaban 14 responden nelayan. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 5 orang (36%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 9 orang (64%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (43%), Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (43%), Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Kelembagaan yang menjawab Terlaksana sebanyak 6 orang (43%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dan dari hasil peneliti turun ke lapangan dan melihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh para anggota mitra koperasi atau nelayan, terdapat beberapa keluhan seperti masalah kerusakan pada mesin kapal bantuan, jika salah satu kapal bantuan tersebut mesinnya rusak maka harus dikirimkan keluar daerah dikarenakan alat untuk memperbaiki mesin kapal tersebut belum ada di natuna,

sementara jika harus dikirimkan terlebih dahulu keluar daerah tentu saja memakan waktu yang tidak sebentar hal ini tentu saja menghambat para nelayan yang hanya mengandalkan kapal tersebut untuk mencari nafkah. Hal ini bisa dilihat dengan lambatnya koordinasi dari pihak pengurus koperasi dalam hal pengaduan masalah yang dihadapi oleh para nelayan, para petugas SKPT malah mengetahui masalah ini dari para nelayan bukan melalui pengurus koperasi.

3. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Misalnya, mengapa Indonesia kurang berhasil menarik investor asing untuk menanamkan modal disini; boleh jadi, ketika dilakukan evaluasi ada banyak sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan jalan dan jembatan guna mengangkut hasil produksi barang-barang industri mereka, kestabilan listrik (tidak *byar-pet* (mati) pada saat produksi), pelabuhan laut dan udara yang sesuai untuk digunakan bagi memasarkan barang-barang produksi mereka, dan banyak lagi. Demikian pula dengan teknologi; karena itulah sarana, prasarana, dan teknologi menjadi hal krusial dalam evaluasi kebijakan publik (dalam buku Leo Agustino, 2017;181-182).

Tabel V.8 Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengawasan sarana prasarana	6 (80%)	4 (20%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Ketersediaan sarana prasarana	1 (10%)	9 (90%)	0 (0%)	10 (100%)

3.	Pemanfaatan sarana prasarana	5 (50%)	5 (50%)	0 (0%)	10 (100%)
	Jumlah	12	18	0	30
	Rata-rata	4	6	0	10
	Persentase	40%	60%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.8 dijelaskan hasil penilaian indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi dari jawaban 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 1 orang (10%), Cukup Terlaksana sebanyak 9 orang (90%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 5 orang (50%), Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (50%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 10 responden peserta petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain hasil dari hasil jawaban kuisisioner 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera peneliti juga mendapatkan informasi melalui

wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera, beliau menyatakan:

“ Untuk ketersediaan sarana dan prasarana ini sendiri seperti kapal dan alat tangkap sebenarnya sudah cukup lah ya, tetapi pemanfaatannya yang tidak bisa maksimal kita lihat saja kapal bantuan itu kan terbuat dari bahan fiber, bahannya saja jika kita lihat di terik matahari semi transparan kan ditambah lagi kapalnya mudah oleng, yang kita takutkan kapal tersebut jika di hempas gelombang yang agak besar bisa-bisa jebol atau patah makanya nelayan-nelayan kita tidak berani untuk mencari ikan kelaut lepas mereka aja berani mencari ikan didaerah yang tidak terlalu jauh dari bibir pantai. Terus alat tangkap bubu, orang biasanyakan bubu terbuat dari kawat ini malah dibikin pakai jaring sehingga ikan pun enggan mau masuk karena bubunya tidak tegak malah berlipat-lipat dan terombang ambing jika arus lautnya kencang” (Wawancara, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.12 WIB).

Selanjutnya tanggapan dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.9 Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengawasan sarana prasarana	4 (29%)	9 (64%)	1 (7%)	14 (100%)
2.	Ketersediaan sarana prasarana	4 (29%)	9 (64%)	1 (7%)	14 (100%)
3.	Pemanfaatan sarana prasarana	3 (21%)	5 (36%)	6 (43%)	14 (100%)

Jumlah	11	23	8	42
Rata-rata	4	8	2	14
Persentase	29%	57%	14%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.9 dijelaskan hasil penilaian indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi dari jawaban 14 responden nelayan. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 9 orang (64%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 1 orang (7%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), Cukup Terlaksana sebanyak 9 orang (64%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 1 orang (7%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 3 orang (21%), Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (36%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 6 orang (43%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 2 orang (14%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dan pada saat peneliti turun ke lapangan para nelayan mengeluhkan kapal bantuan yang terbuat dari bahan fiber tersebut tidak kuat untuk diajak mengarungi laut natuna utara, jika dipaksakan untuk pergi mencari ikan ke laut lepas dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan nelayan, dan juga peneliti melihat di lapangan bahwa alat tangkap bubu dari bantuan SKPT tersebut dibiarkan begitu

saja oleh nelayan karena memang dikatakan oleh nelayan alat tangkap tersebut tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

4. Finansial

Dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Proyek listrik 35.000MW tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh dukungan finansial. Hal ini bisa dilihat dari kasus lain seperti pernah mangkraknya pembangunan *Mass Rapid Transportation* (MRT) di Jakarta. Jika dievaluasi, maka sumber tertundanya pembangunan MRT di Jakarta adalah tidak adanya daya dukung keuangan yang jelas dari pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, kriteria penting lainnya dalam melakukan evaluasi kebijakan adalah dukungan finansial.

Tabel V.10 Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Finansial

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Daya dukung keuangan	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Biaya operasional	2 (20%)	8 (80%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Biaya administrasi	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		13	17	0	30
Rata-rata		4	6	0	10
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.10 dijelaskan hasil penilaian indikator Finansial dari jawaban 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 7 orang (70%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 2 orang (20%), Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (80%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 10 responden peserta petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain hasil dari hasil jawaban kuisisioner 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera, beliau menyatakan:

“ Kalau untuk masalah keuangan kita tidak banyak keluhan dalam mengelola koperasi sejauh ini kan kita ada iuran pokok sebesar 100 ribu itu untuk biaya pertama bagi yang ingin menjadi anggota koperasi dan ada juga iuran wajib bagi

anggota yaitu 20 ribu perbulan. Uang tersebut kita gunakan untuk keperluan koperasi ini misalnya untuk memperbaiki kapal dan sebagainya” (Wawancara, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.12 WIB).



Selanjutnya tanggapan dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.11 Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Finansial

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Daya dukung keuangan	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14 (100%)
2.	Biaya operasional	3 (21%)	6 (43%)	5 (36%)	14 (100%)
3.	Biaya administrasi	1 (7%)	7 (50%)	6 (43%)	14 (100%)
Jumlah		8	21	13	42

Rata-rata	3	7	4	14
Persentase	21%	50%	29%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.11 dijelaskan hasil penilaian indikator Finansial dari jawaban 14 responden nelayan. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (29%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 2 orang (14%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 3 orang (21%), Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (43%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 5 orang (36%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 1 orang (7%), Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang (50%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 6 orang (43%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang menjawab Terlaksana sebanyak 3 orang (21%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang (50%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 4 orang (29%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dan pada saat peneliti turun ke lapangan para nelayan banyak yang mengeluhkan biaya administrasi yang sebesar 100 ribu dirasa memberatkan bagi para nelayan kecil belum lagi ada iuran wajib yang harus dibayar oleh nelayan sebesar 20 ribu perbulan.

5. Regulasi (pendukung)

Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. Pada era Orde Baru, suatu kebijakan selalu didukung oleh Juklak (Petunjuk Pelaksana) dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang bertujuan untuk memudahkan banyak pihak yang menjadi subyek dari suatu kebijakan untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut. Karena itulah, evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya (atau tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung.

Tabel V.12 Distribusi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Regulasi (pendukung)

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya petunjuk pelaksana	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
2.	Adanya petunjuk teknis	3 (30%)	7 (70%)	0 (0%)	10 (100%)
3.	Adanya monitoring pendamping	6 (60%)	4 (40%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		13	17	0	30
Rata-rata		4	6	0	10
Persentase		40%	60%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.12 dijelaskan hasil penilaian indikator Regulasi (pendukung) dari jawaban 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera.

Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 3 orang (30%), Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang (70%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 10 responden peserta petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang (40%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (60%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 0 orang (0%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selain hasil dari hasil jawaban kuisisioner 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Koperasi Usaha Kita Sejahtera, beliau menyatakan:

“ Sejauh ini jika ada bantuan yang ingin diberikan ke nelayan kita selalu diundang untuk rapat di komplek SKPT dijelaskan berapa kita dapat bantuan dan juga disana juga kita ditanyakan pendapat tentang bantuan bantuan yang diberikan apakah dalam pemanfaatannya ada kendala atau bagaimana nah nanti

kita jelaskan saja apa yang jadi keluhan dan kendala dari para nelayan - nelayan kita” (Wawancara, Rabu, 12 Agustus 2020 pukul 13.12 WIB).



Selanjutnya tanggapan dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera melalui penyebaran kuesioner:

Tabel V.13 Distribusi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Indikator Regulasi (pendukung)

No.	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Adanya petunjuk pelaksana	7 (50%)	5 (36%)	2 (14%)	14 (100%)
2.	Adanya petunjuk teknis	8 (57%)	5 (36%)	1 (7%)	14 (100%)
3.	Adanya monitoring pendamping	8 (57%)	6 (43%)	0 (0%)	14 (100%)
Jumlah		23	16	3	42
Rata-rata		8	5	1	14
Persentase		57%	36%	7%	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.13 dijelaskan hasil penilaian indikator Regulasi (pendukung) dari jawaban 14 responden nelayan. Pada item pertama, jawaban Terlaksana sebanyak 7 orang (50%), kemudian jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (36%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 2 orang (14%). Selanjutnya pada item kedua, jawaban Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (36%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 1 orang (7%). Dan pada item penilaian ketiga, jawaban Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), Cukup Terlaksana sebanyak 6 orang (43%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana sebanyak 0 orang (0%).

Maka dengan demikian, hasil rata-rata 3 item penilaian yang didapatkan dari keseluruhan jawaban 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, indikator Regulasi (pendukung) yang menjawab Terlaksana sebanyak 8 orang (57%), jawaban Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang (36%), dan yang menjawab Kurang Terlaksana 1 orang (7%). Sehingga dapat peneliti simpulkan mengkategorikan “Terlaksana”.

Saat peneliti turun ke lapangan banyak para nelayan yang mengatakan bahwa mereka merasa dirangkul oleh pihak SKPT hal ini karena pada saat pihak SKPT mengadakan rapat evaluasi dan monitoring bantuan kapal mereka selalu diundang untuk hadir dan juga disana mereka bisa menyampaikan apa yang mereka keluhkan selama ini.

Setelah membahas hasil dari masing-masing indikator pada penelitian ini, kemudian peneliti membuat rekapitulasi dari seluruh indikator atas tanggapan 12 responden Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:



Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Terhadap Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sumber Daya Aparatur	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Kelembagaan	7 (70%)	3 (30%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Sarana, Prasarana, dan Teknologi	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
4	Finansial	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)
5	Regulasi (pendukung)	4 (40%)	6 (60%)	0 (0%)	10 (100%)

Jumlah	23	27	0	50
Rata-rata	4	6	0	10
Persentase	40%	60%	(0%)	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.14 rekapitulasi keseluruhan hasil penilaian 5 indikator dari 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera yang masing-masing memiliki 3 item penilaian dalam penelitian Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Maka dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil akhir, yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase (40%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase (60%), dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 0 orang dengan persentase (0%). Dengan demikian, hasil penelitian dari 10 responden petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera dikategorikan “Cukup Terlaksana”.

Selanjutnya, rekapitulasi tanggapan 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera dari seluruh indikator penelitian :

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera Terhadap Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

No	Item Penilaian	Skala Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	

1	Sumber Daya Aparatur	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14 (100%)
2	Kelembagaan	6 (43%)	8 (57%)	0 (0%)	14 (100%)
3	Sarana, Prasarana, dan Teknologi	4 (29%)	8 (57%)	2 (14%)	14 (100%)
4	Finansial	3 (21%)	7 (50%)	4 (29%)	14 (100%)
5	Regulasi (pendukung)	8 (57%)	5 (36%)	1 (7%)	14 (100%)
Jumlah		25	36	9	70
Rata-rata		5	8	1	14
Persentase		36%	57%	(7%)	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.15 rekapitulasi keseluruhan hasil penilaian 5 indikator dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera yang masing-masing memiliki 3 item penilaian dalam penelitian Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Maka dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil akhir, yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase (36%), kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase (57%), dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase (7%). Dengan demikian, hasil penelitian dari 14 responden nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera dikategorikan “Cukup Terlaksana”.

Dari tanggapan seluruh responden baik dari petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera serta para nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa penelitian Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra

Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna sesuai dengan variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini keduanya mengkategorikan “Cukup Terlaksana”.

Namun dari hasil observasi dilapangan yang peneliti dapatkan dalam pelaksanaan ini belum seluruhnya berjalan cukup terlaksana, karena kapal bantuan SKPT ini masih tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan dikarenakan spesifikasi kapal yang terbuat dari fiber membuat nelayan takut untuk membawa kapal bantuan SKPT ini, mereka tidak mau mengambil resiko akan keselamatannya dan nelayan lebih memilih menggunakan kapal kayu yang mereka punya. Kemudian alat tangkap yang disediakan dalam kapal bantuan SKPT ini juga tidak digunakan oleh para nelayan karena alat tangkap yang berupa bubu malah terbuat dari bahan jaring bukan dari kawat atau besi hal ini membuat bubu tidak bisa tegak didasar laut semana mestinya dan malah terombang-ambing terbawa arus. Hal ini pun diakui oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Bapak Menteri Edhy Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi bantuan kapal yang akan datang dan akan diusahakan agar kapal bantuan tersebut terbuat dari bahan kayu agar nantinya bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para nelayan. Adapun kendala lainnya yakni penerima kapal bantuan SKPT masih kurang tepat sasaran karena ditemukan beberapa anggota Koperasi yang bukan berprofesi sebagai nelayan malah mendapatkan kapal bantuan tersebut.

C. Faktor-faktor Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra

Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna

Hambatan adalah suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan Program SKPT di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkumkan perindikator, yakni:

1. Hambatan untuk indikator Sumber Daya Aparatur ialah masih kurang optimalnya para petugas SKPT dan Koperasi KUKS dalam menjalankan tugas mereka seperti dalam hal pengawasan karena masih terdapat beberapa penerima kapal bantuan bukan merupakan nelayan tetap melainkan nelayan musiman malah mendapat bantuan tersebut, hal ini membuat beberapa bantuan kapal tersebut menjadi tidak tepat sasaran.
2. Hambatan untuk indikator kelembagaan ialah masih minimnya koordinasi antar lembaga dimana pada saat ada masalah atau kendala yang dihadapi pihak Koperasi seperti kapal yang rusak dan tidak bisa diperbaiki oleh nelayan hal ini malah tidak diurus dan tidak di selesaikan oleh pihak SKPT.
3. Hambatan untuk indikator Sarana, Prasarana, dan Teknologi ialah kurang layak nya bantuan kapal dari SKPT ini untuk digunakan di daerah laut natuna hal ini dikarenakan spesifikasi kapal yang terbuat dari bahan fiber tidak memadai untuk dibawa pergi mencari ikan didaerah laut natuna.

Alat tangkap berupa bubu yang disediakan bersamaan dengan kapal tersebut juga tidak bisa digunakan sama sekali dikarenakan bubu tersebut terbuat dari jaring bukan dari besi atau kawat hal ini mengakibatkan bubu tidak bisa di gunkan atau ditenggelamkan kedasar laut semana mestinya diakrenakan bubu akan hanyut terbawa arus dan gelombang.

4. Hambatan untuk indikator Finansial ialah besaran biaya administrasi sebesar 100 ribu yang harus dikeluarkan oleh para nelayan untuk bergabung di koperasi nelayan dirasakan itu cukup memberatkan belum lagi para nelayan harus membayar iuran wajib 20 ribu perbulan banyak para nelayan mengharapkan biaya administrasi di gratiskan agar masyarakat atau nelayan yang tidak mampu semua bisa bergabung.
5. Hambatan untuk indikator Regulasi (pendukung) ialah pada saat rapat evaluasi dan monitoring kapal bantuan SKPT beberapa anggota koperasi atau nelayan tidak mengerti apa yang disampaikan karena beberapa nelayan tidak sepenuhnya mengerti Bahasa Indonesia hal ini juga mengakibatkan mereka menjadi kesulitan menyampaikan aspirasinya secara langsung ke pihak SKPT pada saat rapat berlangsung.



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilaksanakan peneliti mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Koperasi Nelayan Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna yang menggunakan 5 indikator : Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Teknologi, Finansial dan Regulasi (pendukung). Maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan acuan dari hasil penelitian yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini terutama untuk masukan pihak terkait dalam Pelaksanaan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator sumber daya aparatur yang memiliki item penilaian kualitas SDA sebagai pelaksana kebijakan, kemampuan SDA dalam pelaksanaan kebijakan, memahami tugas dan fungsinya maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Sedangkan hasil dari responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.
2. Untuk indikator kelembagaan yang memiliki item penilaian kelancaran koordinasi, pola kepemimpinan, sinergitas antar lembaga maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “terlaksana”. Sedangkan hasil dari responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.
3. Untuk indikator sarana, prasarana, dan teknologi yang memiliki item penilaian pengawasan sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan sarana dan prasarana maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Sedangkan hasil dari responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Jika

keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

4. Untuk indikator finansial yang memiliki item penilaian daya dukung keuangan, biaya operasional, biaya administrasi maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Sedangkan hasil dari responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.
5. Untuk indikator regulasi (pendukung) yang memiliki item penilaian adanya petunjuk pelaksana, adanya petunjuk teknis, adanya monitoring pendamping maka diperoleh hasil tanggapan dari responden Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “cukup terlaksana”. Sedangkan hasil dari responden Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera pada kategori “terlaksana”. Jika keseluruhan hasil rekapitulasi tanggapan kedua kelompok tersebut digabungkan berada pada kategori “Cukup Terlaksana”.

Dari seluruh hasil kesimpulan setiap indikator, pelaksanaan yang berhasil dilaksanakan dengan baik atas penilaian Petugas SKPT dan Koperasi Usaha Kita Sejahtera ialah indikator Kelembagaan, disebabkan karena penilaian mencapai kategori Terlaksana. Dengan ini bisa dilihat bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkomitmen saling bersinergi untuk mewujudkan terlaksananya program SKPT ini, kerja sama semua pihak tentu saja sangat diperlukan agar semua

kebijakan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Dan pelaksanaan yang dinyatakan berhasil menurut penilaian Nelayan Koperasi Usaha Kita Sejahtera ialah indikator regulasi (pendukung) penilaian mencapai kategori Terlaksana. Atas penilaian tersebut para nelayan merasa mereka benar-benar dirangkul karena disetiap rapat evaluasi dan monitoring bantuan kapal mereka semua diundang dan dilibatkan, ditanya pendapat dan keluhan para nelayan agar semua keluhan mereka bisa dibantu dan dicarikan solusinya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan:

1. Demi terlaksananya program SKPT dengan baik, peneliti mengharapkan kepada para pelaksana program SKPT agar melakukan survei keadaan alam suatu daerah terlebih dahulu sebelum memberikan bantuan kapal atau alat tangkap agar bantuan tersebut bisa digunakan dengan maksimal oleh para nelayan.
2. Kepada para pengurus koperasi peneliti mengharapkan agar lebih teliti dan bersikap tegas dalam mendata ulang nelayan yang benar-benar berhak menerima bantuan ini. Agar tujuan yang sesungguhnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap

permasalahan yang akan diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmitha, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Agustino, Leo, 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi, Bandung, cv. Alfabeta.

Ali, Zaini dan Raden Imam Al-Hafis, 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Buku Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR pers.

- Effendy, Khasan, 2014. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Cetak Kedua Bandung, cv Indra Prahasta.
- Indihono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava media.
- Manullang, 2006. *Manajemen Personalita*. Medan, Gajah Mada University Press.
- Mardales, 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2018. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ndara, Taliziduhu, 20013. *Kybernology*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- N. Duun, William, 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Nugroho. T. Rianto, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grafindo.
- Siagian, Sondang, P. 2006. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Siswanto, M, Bedjo. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Erlangga.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie, Inu K. 2016. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Bandung, PT. Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Umar Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli & Moris Adidi. Yogya. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumen :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Kepmen-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 73/Kepmen-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau kecil dan Kawasan Perbatasan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/Permen-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-KP/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2016

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau